



Article Informations
Corresponding Email:
ikapermata963@gmail.com

Received: 21/08/2024; Accepted:
07/02/2025; Published: 07/02/2025

PERAN *UNITED NATIONS WOMEN* (UNW) DALAM MENGATASI DISKRIMINASI PEREMPUAN DI INDIA TAHUN 2018-2022

Ika Ayu Permatasari¹, Suwarti Sari², Tholhah³

^{1,2,3}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis upaya dari *UN Women* dalam mengatasi segala bentuk diskriminasi yang terjadi pada para perempuan di India. Sebab, India menjadi negara dengan tingkat diskriminasi terhadap perempuan yang cukup tinggi. Dari hasil yang telah didapatkan, akar diskriminasi tersebut terletak pada kuatnya patriarki, adat istiadat, dan agama. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Liberalisme, Teori Liberalisme Institusional, Konsep Peran, dan Konsep Organisasi Internasional.

Tipe penelitian dari penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan peran dari *UN Women* dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di India. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa *UN Women* memiliki 3 peran, yakni peran sebagai arena, instrumen, dan aktor independen untuk mengatasi masalah tersebut. Peran *UN Women* sebagai arena yaitu melalui kerja samanya dengan beberapa pihak di India untuk menerapkan *Second Chance Education and Vocational Learning Programme* (SCE Programme) di negara tersebut. *UN Women* berperan sebagai instrumen dengan menjadi fasilitator bagi perempuan di India melalui implementasi SCE Programme dan mitra-mitra yang ingin ikut berperan di dalam program tersebut. Peran *UN Women* sebagai aktor independen ditunjukkan melalui implementasi SCE Programme di India. Adapun tantangan bagi *UN Women* dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di India yaitu melekatnya budaya dan norma sosial dari masyarakat India, serta kegagalan pemerintah India dalam mengimplementasikan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).

Kata Kunci: *UN Women*, India, Diskriminasi, Perempuan

Abstract

This research aims to find out, describe, and analyze the efforts of UN Women in overcoming all forms of discrimination that occur to women in India. Because, India is a country with a high level of discrimination against women. From the results that

have been obtained, the roots of this discrimination lie in the strength of patriarchy, customs, and religion. This research uses the Liberalism Approach, Institutional Liberalism Theory, Role Concept, and International Organization Concept.

The research type of this research is descriptive qualitative, which aims to describe the role of UN Women in overcoming discrimination against women in India. The results obtained show that UN Women has 3 roles, namely the role as an arena, instrument, and independent actor to overcome the problem. UN Women's role as an arena is through its cooperation with several parties in India to implement the Second Chance Education and Vocational Learning Program (SCE Program) in the country. UN Women acts as an instrument by becoming a facilitator for women in India through the implementation of the SCE Programme and partners who want to take part in the program. UN Women's role as an independent actor is demonstrated through the implementation of the SCE Program in India. The challenges for UN Women in overcoming discrimination against women in India are the inherent culture and social norms of Indian society, as well as the failure of the Indian government to implement the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

Keywords: *UN Women, India, Discrimination, Women*

PENDAHULUAN

India merupakan salah satu negara berdaulat yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara ini memiliki berbagai permasalahan, seperti kesenjangan sosial, ekonomi, konflik agama, serta diskriminasi terhadap perempuan dan ketidaksetaraan gender. Perempuan di India seringkali mendapatkan tindakan diskriminasi dalam berbagai bidang, baik dalam bidang politik, pendidikan, ketenagakerjaan, dan bahkan kesehatan. Menurut survei dari Pew Research Center tahun 2022, 23% masyarakat India mengatakan bahwa terjadi banyak diskriminasi perempuan di negaranya (Center, 2022). Kemudian, sekitar 16% perempuan India juga merasa didiskriminasi (Center, 2022). Data dari survei tersebut menjelaskan bahwa diskriminasi pada perempuan lebih tinggi dibanding dengan diskriminasi agama maupun kasta. Patriarki dan tradisi Hindu/keagamaan menjadi beberapa penyebab dari adanya diskriminasi ini.

Kemudian, berdasarkan data angka rasio gender di India pada 2018 dari Global Data, jumlah laki-laki adalah 107.91 per 100 perempuan (Global Data, 2021). Terlihat belum sebanding memang. Sebab, kebanyakan masyarakat India lebih mengharapkan kelahiran anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Kelahiran anak perempuan dianggap akan membebani

keluarga karena sebuah tradisi, yakni saat menikah, pihak perempuan yang harus memberi mahar kepada pihak laki-laki. Ini berdampak pada banyaknya tindakan aborsi terhadap janin berjenis kelamin perempuan. Bukan hanya itu. Dari data *United Nations Development Programme* (UNDP), pada 2020 lalu, India berada di peringkat 123 dari 189 negara dalam *Gender Inequality Index* (UN Women, 2022). Kemudian pada 2021, dalam *Global Gender Gap Index*, menempatkan negara tersebut di peringkat 140 dari 156 negara (UN Women, 2022).

Selain itu, menurut data dari Fraym, pada 2021, terdapat 25% atau sekitar 15,1 juta perempuan menikah di bawah usia 18 tahun di India. Dan sekitar 2,2 juta atau 4% perempuan menikah di bawah usia 15 tahun (Fraym, 2021). Faktor ketidaksetaraan gender dan ekonomi turut andil dalam mendorong pernikahan dini tadi. Lalu, kebanyakan keluarga di India lebih mengutamakan pendidikan bagi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Dari data statistik yang diperoleh dari Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Ministry of Human Resource Development*) India menunjukkan bahwa antara tahun 2015-2016, jumlah perempuan per 100 laki-laki pada *Primary School* (I-V) adalah 93 orang, 95 orang pada *Upper Primary School* (VI-VIII), dan pada *Secondary School* (IX-X) adalah 91 orang (MHRD, 2018). Kemudian, jumlah perempuan di *Senior Secondary School* (XI-XII) adalah 90 perempuan per 100 laki-laki, dan pada Pendidikan Tinggi, terdapat 86 perempuan per 100 laki-laki (MHRD, 2018). Sehingga, dari data tersebut, jumlah perempuan dalam bidang pendidikan masih belum seimbang dengan jumlah laki-laki.

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang penting bagi masyarakat, terutama masyarakat India. Rendahnya pendidikan dapat menimbulkan permasalahan, seperti terbatasnya peluang pekerjaan, kemiskinan, dan bahkan semakin berkembangnya tindakan diskriminasi perempuan serta pemikiran patriarki yang terus ada di dalam kehidupan masyarakat di sana. Sebenarnya, pemerintah India sendiri telah memberlakukan *The Constitution (Eighty-Sixth Amendment) Act 2002* tentang Hak Pendidikan, melalui penambahan pasal 21A. Pasal tersebut menyatakan

bahwa pendidikan wajib bagi anak-anak adalah dari usia 6 hingga 14 tahun (The Constitution (Eighty-Sixth Amendment) Act, 2002 Right to Education, 2002). Di samping itu, pasal 21A menyatakan pula bahwa pemerintah akan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan gratis sebagai salah satu hak asasi dari anak-anak di India (The Constitution (Eighty-Sixth Amendment) Act, 2002 Right to Education, 2002). Tetapi pada kenyataannya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada ketidakseimbangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi permasalahan di negara tersebut.

Berbagai permasalahan yang dialami oleh perempuan di India tadi menjadi perhatian tersendiri bagi UN *Women*. Memberi pendidikan dan pemberdayaan perempuan di sana khususnya, menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh UN *Women*. Tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi para perempuan di India. Selain itu, agar para perempuan di negara tersebut pun mendapatkan hak kesetaraan gender dan kehadiran mereka juga tidak dikesampingkan.

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yakni untuk menggambarkan tentang peran UN *Women* dalam mengatasi diskriminasi perempuan di India. Kemudian, pengumpulan data dari penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, yang biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu (Gunawan, 2015). Sehingga, data yang diperoleh tersebut berupa kata, kalimat, dan juga gambar. Lokasi penelitian yang peneliti ambil yaitu di Kantor UN *Women* India di UN House, 55, Lodhi Estate, New Delhi, Delhi 110003, India. Alasannya adalah bahwa penelitian ini memperoleh data dari situs resmi UN *Women* India. Hal ini berkaitan dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni data sekunder berupa studi literatur.

Karena menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sendiri sebagai instrumen penelitiannya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan/literatur. Data-data yang diperoleh merupakan data-data yang membahas tentang peran UN Women untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di India, sekaligus terkait diskriminasi yang terjadi pada perempuan di sana dengan sumber-sumber berupa data statistik, buku, dokumen resmi, jurnal, artikel berita, dan skripsi. Kemudian, teknik analisa data yang digunakan adalah dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu: 1) kondensasi data (*data condensation*), di mana peneliti mengumpulkan data yang kemudian data-data yang didapatkan tersebut dipilah dan diolah agar nantinya dapat ditarik kesimpulan; 2) penyajian data (*data display*) atau pengorganisasian atau penggabungan data-data yang telah didapatkan, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk kata atau kalimat; dan 3) penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yang mana tahap ini dapat dilakukan jika data yang telah dikumpulkan diolah (kondensasi data) dan disajikan melalui proses penggabungan data. Terakhir, penelitian ini menggunakan bahan referensi untuk menguji keabsahan data yang telah diperoleh. Bahan referensi yang digunakan yakni dokumen-dokumen dan laporan resmi, baik dari UN Women maupun dari pemerintah India. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jurnal-jurnal ilmiah dan buku. Tujuannya agar data yang telah didapatkan lebih valid.

Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan Liberalisme

Di dalam Liberalisme, aktor internasional bukan hanya negara saja, melainkan terdapat aktor-aktor lainnya seperti organisasi internasional, individu, perusahaan multinasional, dan lain sebagainya. Terjaminnya hak-hak dasar individu lebih dikedepankan oleh kaum ini, salah satunya adalah John Locke. Dia mengatakan bahwa negara harus menjamin hak dan kebebasan setiap individu tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun (Jackson & Sørensen, 2013). Kemudian, salah satu ahli teori Liberal, Immanuel Kant, menawarkan segitiga Kantian untuk mencapai perdamaian

yaitu mencakup demokrasi, ketergantungan ekonomi, dan organisasi internasional (Hadiwinata, 2017). Pendekatan Liberalisme memiliki relevansi dengan penelitian ini, karena pendekatan tersebut mengakui bahwa organisasi internasional juga termasuk ke dalam aktor internasional dan hak asasi manusia harus dikedepankan.

Teori Liberalisme Institusional

Teori Liberalisme Institusional merupakan salah satu aliran dari Liberalisme. Menurut teori ini, adanya institusi internasional atau organisasi internasional mengharuskan setiap negara untuk mematuhi berbagai aturan dan perjanjian internasional yang ada (Hadiwinata, 2017). Kemudian, institusi internasional sebagai wadah bersatunya kepentingan setiap negara ini juga dapat meningkatkan rasa saling percaya di antara mereka.

Konsep Peran

Konsep peran menurut Bruce J. Biddle adalah ilmu yang berkaitan dengan studi tentang perilaku sebagai karakteristik seseorang dan dengan berbagai proses yang mungkin saja menghasilkan, menjelaskan, atau dipengaruhi oleh perilaku tersebut (Biddle, 1979). Peran sendiri sering dikaitkan dengan status sosial seseorang atau sekelompok orang (dengan identitas yang sama) di dalam masyarakat. Sehingga, peran setiap orang akan berbeda-beda, tergantung status sosial mereka. Jika dikaitkan dengan peran dari organisasi internasional, yang mereka lakukan biasanya tergantung pada faktor eksternal dan internal. Peran tersebut baik yang mengharuskan mereka untuk mengambil suatu tindakan atau adanya inisiatif dari organisasi internasional itu sendiri untuk berperan.

Konsep Organisasi Internasional

Menurut Clive Archer, organisasi internasional sebagai struktur formal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antar anggota untuk mencapai kepentingan bersama, di mana keanggotaannya paling sedikit adalah dua negara berdaulat (Archer, 2001). Kemudian, Archer membagi peran organisasi internasional menjadi 3, yakni instrumen (*instrument*), arena (*arena*), dan aktor (*actor*) (Archer, 2001). Peran organisasi internasional

sebagai instrumen (*instrument*) yaitu bahwa organisasi internasional berperan untuk menjembatani pencapaian tujuan setiap anggotanya. Lalu, organisasi internasional memiliki peran sebagai arena (*arena*), di mana organisasi internasional memfasilitasi setiap pertemuan untuk bekerja sama, berdiskusi, melakukan negosiasi, dan bahkan berdebat bagi setiap anggotanya (Archer, 2001). Organisasi internasional sebagai aktor independen adalah bahwa organisasi internasional tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun ataupun faktor eksternal dalam mengambil keputusan.

PEMBAHASAN

Peran *United Nations Women* (UNW) dalam Mengatasi Diskriminasi Perempuan di India Tahun 2018-2022

1. Peran UN Women sebagai Arena

Menurut Cliver Archer, peran organisasi internasional sebagai arena yakni bahwa organisasi tersebut menjadi forum atau tempat pertemuan bagi para anggotanya untuk melakukan diskusi, debat, dan kerja sama (Archer, 2001). Di dalam pertemuan tersebut, anggota dari organisasi internasional seringkali membahas suatu isu, seperti ekonomi, politik, kemanusiaan, lingkungan, dan sebagainya. Hasil dari pertemuan dan diskusi ini dapat berupa kesepakatan untuk saling bekerja sama.

1) Bekerja Sama dengan Berbagai Pihak untuk Mengimplementasikan *Second Chance Education and Vocational Learning Programme*

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2015 dengan judul, "*The World's Women 2015: Trends and Statistics*" menyatakan bahwa pada saat itu, terdapat 58 juta anak usia sekolah dasar (*primary school*) di seluruh dunia mengalami putus sekolah (Nations, 2015). Lebih dari setengahnya adalah perempuan. Kemudian, terdapat sekitar 781 juta orang rentang usia 15 tahun ke atas yang buta huruf di seluruh dunia, dan hampir dua pertiganya didominasi oleh perempuan (Nations, 2015). Menanggapi masalah tersebut, UN Women kemudian mengambil peran dengan menginisiasi pembentukan *Second Chance Education and Vocational Learning*

Programme (SCE *Programme*) untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para perempuan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Pelaksanaan program tersebut dilakukan atas kerja samanya dan dukungan dana dari BHP Foundation.

SCE *Programme* diimplementasikan setidaknya di enam negara, yakni India, Australia, Meksiko, Kamerun, Chili, dan Yordania. Di India, UN Women bekerja sama dengan *Professional Assistance for Development Action* (PRADAN), *National Institute of Open Schooling* (NIOS), Chaitanya Foundation, *National Skill Development Corporation* (NSDC), pemerintah negara bagian India, Manjari Foundation (MF), *National HRD network*, dan mitra-mitra lainnya untuk mengimplementasikan SCE *Programme* ini (UN Women, 2021). Kerja sama yang dilakukan oleh UN Women dengan berbagai pihak tersebut sejalan dengan peran organisasi internasional sebagai arena, yakni di mana anggotanya selain dapat melakukan diskusi dan debat, mereka juga dapat menjalin kerja sama.

2. Peran UN Women sebagai Instrumen

Peran organisasi internasional sebagai instrumen menurut Clive Archer adalah sebagai alat/instrumen yang digunakan oleh anggotanya untuk mencapai tujuan mereka (Archer, 2001).

1) Fasilitator bagi Perempuan di India dan Mitranya

Fasilitator di dalam SCE *Programme* adalah siapapun yang terlibat dalam implementasi dari program tersebut, baik di hub maupun komponen online, serta yang melakukan kontak langsung dengan perempuan yang mengikuti SCE *Programme* (UN Women, 2023). Peran UN Women sebagai fasilitator ditunjukkan melalui penciptaan dan pengimplementasian *Second Chance Education and Vocational Learning Programme* (SCE *Programme*) untuk memfasilitasi para perempuan yang memiliki keterbatasan akses pada pendidikan, di India. Dari situ, memperlihatkan bahwa UN Women menjadikan dirinya sendiri sebagai alat atau instrumen bagi perempuan di India. Sebab, perannya ini merupakan inisiatifnya sendiri, di mana program

tersebut juga merupakan hasil ciptaannya dan India memang menjadi salah satu target dari pengimplementasiannya.

Selain menjadi fasilitator bagi perempuan di India, UN Women juga menjadi fasilitator bagi mitranya untuk mengimplementasikan SCE *Programme*. Mitra utamanya adalah BHP Foundation. Di dalam laporan keuangan UN Women tahun 2021, organisasi amal tersebut telah menyumbangkan dana kepada UN Women sebesar USD 5,479,617 (UN Women, 2022). Di India, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UN Women juga bekerja sama dengan berbagai mitra. Artinya, UN Women membuka peluang sekaligus memfasilitasi para mitra, terutama organisasi amal, untuk dapat berperan dalam SCE *Programme*.

2) Strategi *United Nations Women* (UNW) dalam mengimplementasikan *Second Chance Education and Vocational Learning Programme* (SCE *Programme*) di India

Menurut Imam Ahmad, S.Kom., M., Kom., dkk, strategi merupakan perumusan tugas, tujuan, dan sasaran organisasi, strategi kebijakan dan program pokok untuk mencapainya, dan metode yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa strategi telah diimplementasikan untuk mencapai tujuan akhir organisasi (Ahmad, S.Kom., M.Kom. et al., 2022). Sasaran dari SCE *Programme* adalah para perempuan yang tidak dapat memperoleh pendidikan karena kemiskinan, pernikahan dini, lingkungan belajar yang tidak aman bagi perempuan, infrastruktur dan fasilitas belajar yang kurang memadai, dan lain sebagainya (BHP Foundation, n.d.). Di India, implementasi dari SCE *Programme* di sana meliputi: memberikan kesempatan bagi para perempuan di India untuk kembali ke pendidikan formal; memberikan pelatihan keterampilan, bimbingan, dan ruang aman; memberikan pelajaran tentang ketenagakerjaan dan kewirausahaan; serta membentuk kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan (UN Women, n.d.). UN Women memiliki strategi demi mencapai tujuan dari SCE *Programme* yang diimplementasikan di India tersebut, yaitu:

- Memberikan kesempatan bagi para perempuan di India untuk dapat kembali ke pendidikan formal. Untuk mencapai tujuan tersebut, UN Women bekerja sama dengan *National Institute of Open Schooling* (NIOS) dan *state-level open schooling systems*. NIOS sendiri merupakan Sekolah Terbuka yang menyediakan Pendidikan Menengah (*Secondary*), Pendidikan Menengah Atas (*Senior Secondary*), dan Pendidikan Kejuruan (*Vocational*) (Schooling, n.d.). Melalui kerja sama ini, UN Women dapat mendaftarkan para perempuan ke NIOS.
- Memberikan pelatihan keterampilan, bimbingan, dan ruang aman. Implementasi dari tujuan tersebut dilakukan oleh UN Women melalui kerja samanya dengan beberapa pihak untuk melaksanakan program *UN Women's Funding and Learning Initiative for Girls in Higher Education and Skills Training* (FLIGHT).
- Memberikan pelajaran tentang ketenagakerjaan dan kewirausahaan, yang dilaksanakan melalui strategi pengajaran dan pelatihan kepada para petani perempuan tentang teknik-teknik pertanian baru, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil panen mereka (UN Women, 2022).
- Membentuk kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Ini merupakan suatu strategi dari UN Women yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintah India yang berkaitan dengan pendidikan.

3. Peran UN Women sebagai Aktor Independen

Menurut Clive Archer, peran organisasi internasional sebagai aktor independen yaitu bahwa organisasi internasional dapat bertindak di kancah dunia secara mandiri, tanpa terpengaruh secara signifikan oleh kekuatan-kekuatan luar (Archer, 2001). Isu pendidikan perempuan di India menjadi isu yang menjadi perhatian tersendiri bagi UN Women. Maka dari itu, organisasi tersebut berperan sebagai aktor untuk mengimplementasikan *SCE Programme* di sana.

1) Mengimplementasikan *Second Chance Education and Vocational Learning Programme*

Di India, *SCE Programme* diimplementasikan di 12 distrik dan 200 desa di empat negara bagian India, yakni Maharashtra, Odisha, Rajasthan, dan Bihar (UN Women, n.d.). Implementasi *SCE Programme* oleh UN Women di India, yakni:

- Memberikan kesempatan kepada perempuan di India agar dapat kembali ke pendidikan formal

Masalah kemiskinan, patriarki, diskriminasi terhadap perempuan, budaya menjadi beberapa penyebab yang menghambat akses perempuan terhadap pendidikan formal. Oleh karena itu, *SCE Programme* membuka kesempatan agar perempuan di India yang putus sekolah maupun yang tidak dapat mengakses pendidikan, dapat memperoleh pendidikan formal. Dalam hal ini, UN Women bekerja sama dengan *National Institute of Open Schooling (NIOS)* dan *state-level open schooling system* untuk mendaftarkan para perempuan yang terpinggirkan ke sekolah formal. Di dalam laporan dari UN Women, "*UN Women in India*", *SCE Programme* berhasil mendaftarkan sebanyak 3.836 perempuan dan anak perempuan ke pendidikan formal (UN Women, n.d.). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa cukup banyak perempuan dan anak perempuan di India yang masih ingin melanjutkan pendidikan. Maka, *SCE Programme* dapat menjadi jembatan bagi mereka untuk mencapainya.

- Memberikan pelatihan keterampilan, bimbingan, dan ruang aman. Kegiatan pelatihan keterampilan dan bimbingan atau *UN Women's Funding and Learning Initiative for Girls in Higher Education and Skills Training (FLIGHT)* merupakan bagian dari *SCE Programme* yang berfokus pada pengembangan keterampilan perempuan dan anak perempuan di India. Dalam hal ini, UN Women bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, politeknik pemerintah, *government Industrial Training Institutes (ITIs)*, *Department of Higher and Technical Education*, dan *Skill Development, Employment and Entrepreneurship Department* Pemerintah Negara Bagian Maharashtra. FLIGHT diimplementasikan di 5 distrik di Maharashtra, yakni Kota Mumbai, Thane, Pinggiran Kota Mumbai, Raigad, dan Palghar. Selain untuk memberikan pelatihan keterampilan dan memberikan peluang bagi para perempuan agar dapat memperoleh pekerjaan, adanya program FLIGHT juga bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat sekitar untuk

menyediakan lingkungan yang baik dan aman bagi perempuan untuk melanjutkan pekerjaan maupun pendidikan.

- Memberikan pelajaran tentang ketenagakerjaan dan kewirausahaan

Perempuan pedesaan di India banyak yang bekerja di bidang pertanian atau agrikultur. Di antara tahun 2021-2022, sebanyak 76% perempuan pedesaan di negara tersebut bekerja di bidang pertanian (Fernandez & Puri, 2023). Oleh sebab itu, melalui *SCE Programme*, *UN Women* mengajari para petani perempuan di sana tentang teknik-teknik baru sekaligus berkelanjutan. Teknik-teknik tersebut yakni seperti penggunaan benih yang berkualitas, teknik pertanian organik, dan pengelolaan hama dengan tujuan agar hasil panen para petani perempuan ini dapat meningkat. Di dalam laporan dengan judul, "*UN Women in India*", *UN Women* melaporkan bahwa telah ada 8.252 orang perempuan yang mengikuti pelatihan ini (UN Women, n.d.). Di samping mengajari dan melatih perempuan di India tentang pengelolaan pertanian, *SCE Programme* juga memberikan dukungan dana kepada perempuan yang telah mengikuti pelatihan kejuruan untuk memulai usaha kecil (mikro). Terdapat 1.863 perempuan yang telah membuka usaha mereka sendiri pada 2021 (UN Women, n.d.). Dengan adanya dukungan dana ini, tentu akan sangat membantu para perempuan di India agar mereka dapat memperoleh pendapatan melalui usaha yang mereka buka.

- Membentuk kebijakan terkait pendidikan dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan

Selain bertujuan untuk melatih dan memberikan kesempatan bagi para perempuan maupun anak perempuan untuk kembali bersekolah, *SCE Programme* digunakan sebagai alat oleh *UN Women* untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah India. Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan bagi perempuan. Hasilnya pada Juli 2020, dengan adanya *SCE Programme*, *UN Women* berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah Negara Bagian Rajasthan untuk

menghapuskan biaya sekolah bagi perempuan dan anak perempuan yang ingin kembali bersekolah (UN Women, 2021). Di sisi lain, UN Women juga melakukan kerja sama dengan *National Skill Development Corporation* (NSDC) untuk membentuk suatu komunitas pelatihan kejuruan, salah satunya pelatihan responsif gender bagi para pelajar perempuan di India.

- Kegiatan SCE *Programme* saat adanya Covid-19
Solusi yang diterapkan oleh UN Women dan para pendidik di dalam SCE *Programme* di India pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan kegiatan belajar mengajar secara online, yakni melalui aplikasi Zoom dan WhatsApp. Selain itu, melalui SCE *Programme*, UN Women memberikan pelatihan dan sertifikasi terkait pelayanan kesehatan yang aman ketika pandemi Covid-19 kepada 10.000 perawat dan juga asisten perawat di 20 negara bagian India (UN Women, 2021). Kemudian, SCE *Programme* juga memberikan bantuan peralatan medis yang diperuntukkan bagi pasien Covid-19 sebanyak 4.800, 840 oksimeter, dan alat pelindung diri bagi para petugas kesehatan yang ada di sana (UN Women, 2021). Bantuan tersebut membantu pemerintah India dari segi ekonomi juga, karena membantu pengeluaran pemerintah India dalam bidang kesehatan.

Dari sini, UN Women memiliki peran sebagai aktor independen, karena tindakannya untuk memberdayakan perempuan di India melalui SCE *Programme* adalah atas dasar inisiatif dan keputusannya sendiri. Sebab, SCE *Programme* ini merupakan program yang diciptakan oleh UN Women sendiri. Sehingga, tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap UN Women untuk mengimplementasikan program tersebut di India. Hal ini memang sejalan dengan peran organisasi internasional sebagai aktor independen. Namun, karena UN Women bekerja sama dengan mitra-mitra yang ada di India untuk membantu menjalankan program tersebut di sana, ini akan mempengaruhi kemandirian dari UN Women.

2) Perkembangan Implementasi *Second Chance Education and Vocational Learning Programme*

Di dalam laporan dari UN Women yang dikeluarkan pada 2022, implementasi dari SCE *programme* di India memberikan hasil yang positif. Sejak diimplementasikan dari tahun 2018, hasil dari SCE *programme* yang diterapkan di India hingga dikeluarkannya laporan tersebut, yaitu (UN Women, 2022):

- UN Women telah mendaftarkan sekitar 3.863 perempuan dan anak perempuan di India. Kemudian, dari jumlah tersebut, terdapat 2.535 perempuan yang menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (*Secondary*) dan Sekolah Menengah Atas (*Higher Secondary*) di *National Institute of Open Schooling*. Dapat penulis simpulkan bahwa dengan jumlah perempuan yang akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan mereka, menjadi pencapaian yang baik dari SCE *Programme*, terutama UN Women sebagai inisiator dari program tersebut.
- Terdapat 4.319 perempuan di India yang diberikan pelatihan keterampilan, di mana 3.737 di antaranya telah menyelesaikan pelatihan tersebut. Lalu, 1.407 perempuan di antaranya juga telah bekerja. Sehingga, pelatihan keterampilan yang diberikan kepada mereka dapat menjadi pegangan untuk mencari pekerjaan.
- SCE *Programme* juga memberikan pengajaran kepada 8.252 petani perempuan di India mengenai teknik-teknik pertanian baru, yang bertujuan agar hasil panen mereka dapat meningkat.
- SCE *Programme* mendukung 2.686 perempuan di India untuk membuka usaha kecil. Lalu, terdapat 45 pengusaha perempuan yang mendapatkan dukungan dari program ini untuk mengembangkan bisnis yang aman dari Covid-19, seperti bisnis online. Contohnya yaitu bisnis saree (sari) yang dipasarkan secara online. Dukungan SCE *Programme* kepada perempuan dan para pengusaha perempuan untuk mengembangkan bisnis tersebut tentunya membantu perempuan di sana agar mereka memiliki penghasilan sendiri.
- Melalui kemitraannya dengan *National Skill Development Corporation* (NSDC), SCE *Programme* telah melatih sebanyak 4.500 pelatih untuk program pelatihan kejuruan mengenai gender. Selain itu juga memberikan pengetahuan dan pelatihan keterampilan agar mereka dapat menghubungkan sensitivitas gender di setiap pelatihan yang mereka berikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelatihan kejuruan.

- Hingga laporan dari UN Women tentang SCE Programme ini dikeluarkan pada 2022, *UN Women's Funding and Learning Initiative for Girls in Higher Education and Skills Training (FLIGHT)* telah memiliki lebih dari 470 perempuan dan anak perempuan yang sedang menjalani pelatihan keterampilan kerja. Menurut penulis, ini dapat menjadi jalan untuk membuktikan bahwa perempuan juga dapat bekerja dalam berbagai bidang dan seharusnya setara dalam bidang pekerjaan dengan laki-laki.

4. Tantangan *United Nations Women (UNW)* dalam Mengatasi Diskriminasi Perempuan di India

Tantangan bagi *UN Women* dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di India yaitu dari budaya dan norma sosial masyarakat India, maupun dari pemerintah India itu sendiri.

1) Budaya dan Norma Sosial Masyarakat India

Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya, seperti budaya patriarki, masih melekat di kehidupan masyarakat India. Perempuan dianggap sebagai milik laki-laki. Sehingga, tidak jarang perempuan mengalami penindasan oleh kaum laki-laki. Ruang gerak mereka pun terbatas. Lalu, masyarakat India menganggap jika anak laki-laki lebih penting dibandingkan anak perempuan (Jasmine, 2022). Hal ini memicu banyaknya tindakan aborsi selektif terhadap janin perempuan. Kemudian, walaupun pemerintah India telah melarang dilakukannya praktik *dowry* melalui *The Dowry Prohibition Act* Tahun 1961, masih banyak masyarakat India yang melaksanakan praktik tersebut. Ini dibuktikan dengan kematian akibat mahar (*dowry death*) yang masih tinggi. Pada 2019 saja, kematian mahar di India sebanyak 7,141 kasus (NDTV, 2022). Ini menjadi bukti masih banyaknya kasus kematian akibat mahar, dan mahar yang harus ditanggung oleh pihak perempuan tersebut, sangat merugikan mereka.

Praktik budaya lainnya yang ada di India adalah praktik Devadasi. Praktik ini memaksa anak-anak perempuan untuk mengabdikan dirinya secara sukarela untuk memuja dan melayani dewa/dewi atau kuil (Indonesia, 2023). Biasanya sebelum mencapai masa pubertas, anak-anak perempuan ini akan dinikahkan dengan dewa (C. of I. Foundation, 2023). Mereka tidak diizinkan untuk menikah dengan pria manapun dan harus mengorbankan

keperawanan mereka kepada pria yang lebih tua, yang akan memberikan imbalan berupa uang maupun hadiah (Indonesia, 2023). Praktik ini menjadi masalah, karena pada kenyataannya merupakan praktik perbudakan seks dan prostitusi, namun ditutupi sebagai praktik keagamaan. Selain mengalami perbudakan seks, pelecehan seksual, dan harus terjun ke dunia prostitusi demi uang, perempuan di India juga tidak jarang mengalami kekerasan. Kekerasan tersebut baik kekerasan fisik maupun seksual.

Masalah diskriminasi terhadap perempuan di India menjadi masalah yang sering terjadi. Masalah tersebut juga seharusnya dapat segera diatasi. Peran UN *Women* untuk mengatasi masalah ini semakin dibutuhkan. Berbagai program dan tindakan yang dilakukan oleh UN *Women* dapat setidaknya membantu memberikan hak-hak dasar bagi perempuan yang ada di sana.

2) Kegagalan Pemerintah India dalam Mengimplementasikan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW)

India menjadi salah satu negara peratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Artinya, negara tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang tercantum di dalamnya. Namun demikian, implementasi CEDAW di India masih kurang dapat dilakukan. Sebab, pemerintah India sendiri masih berkuat pada budaya yang dianut oleh masyarakatnya (Abdullah & Hastira, 2023). Hal tersebut memang betul adanya. Sebab, budaya, patriarki, dan norma sosial di dalam masyarakat India pada kenyataannya masih kental. Akibatnya, implementasi dari CEDAW di negara tersebut masih terbatas. Apalagi banyak praktik-praktik, baik adat istiadat maupun agama yang mendiskriminasi perempuan yang masih dilakukan oleh masyarakat India hingga saat ini. Sehingga, masalah tersebut menjadi satu dari beberapa faktor kegagalan pemerintah India dalam mengimplementasikan CEDAW.

Kegagalan pemerintah India dalam mengimplementasikan CEDAW dapat dilihat dari laporan-laporan tentang diskriminasi

perempuan yang masih terjadi di sana. Laporan dari *International Labor Organization* (ILO) pada 2021 menyebutkan bahwa 81,8% perempuan di India bekerja di perekonomian atau pekerjaan informal (Jhabvala et al., 2023). Di dalam pekerjaan informal ini, jumlah perempuan lebih mendominasi dibandingkan dengan laki-laki. Pekerjaan para perempuan di India di sektor informal, yakni seperti di pertanian dan ekonomi-gig. Di dunia politik, partisipasi perempuan India di bidang tersebut masih rendah. Masyarakat di sana menganggap bahwa politik sebagai ranahnya laki-laki, sehingga perempuan tidak dianjurkan untuk terjun di dalamnya (Welle, 2022). Tentu saja anggapan tersebut salah. Politik bukan hanya bidang yang diperuntukkan bagi laki-laki saja. Tetapi, perempuan pun berhak untuk terjun di dalamnya.

Masalah diskriminasi terhadap perempuan di India lainnya yang masih terjadi, yakni seperti kasus kematian mahar (*dowry death*), pernikahan dini, dan bahkan kejahatan terhadap perempuan. Di tahun 2020, ketika pandemi Covid-19 mulai merebak ke seluruh dunia, kejahatan terhadap perempuan di India pada tahun tersebut berdasarkan laporan dari *National Crime Records Bureau* (NCRB) adalah sebanyak 371,503 kasus (Bureau, 2023). Namun, kemudian mengalami peningkatan pada 2021, yakni sejumlah 428,278 kasus (Bureau, 2023). Data-data tersebut menunjukkan bahwa kejahatan terhadap perempuan di India masih tinggi. Bagi penulis, kejahatan terhadap perempuan harus benar-benar ditangani dengan tegas oleh pemerintah India. Sebab, dari data yang ada, masalah tersebut sangat mengkhawatirkan dan merugikan perempuan.

Dari beberapa kasus diskriminasi terhadap perempuan di India yang sudah dijelaskan, peran pemerintah India untuk menegakkan kesetaraan gender dan mengimplementasikan CEDAW masih belum maksimal. Sebab, pada kenyataannya, meskipun pemerintah India telah memberlakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di negaranya, kasus diskriminasi

tersebut masih sering terjadi. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan bagi UN Women untuk membantu pemerintah India dalam mengimplementasikan CEDAW. Tujuannya adalah agar pemerintah India menjadikan segala kebutuhan dan hak-hak perempuan sebagai prioritas tersendiri dari kebijakan yang dibuatnya.

KESIMPULAN

Jadi, kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan data yang telah diperoleh, peran UN Women dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di India terbagi menjadi 3, yakni peran sebagai arena, instrumen, dan aktor. Peran UN Women sebagai arena yaitu melalui kerja samanya dengan beberapa mitra di sana, seperti *Professional Assistance for Development Action* (PRADAN), *National Institute of Open Schooling* (NIOS), *Yayasan Chaitanya*, *National Skill Development Corporation* (NSDC), pemerintah negara bagian India, *National Skill Development Corporation* (NSDC), *Yayasan Manjari* (MF), *National HRD network*, dan lainnya untuk mengimplementasikan *Second Chance Education and Vocational Learning Programme* (SCE Programme) di India.

Peran UN Women sebagai instrumen yaitu dengan menjadi fasilitator, yakni dengan menjadikan dirinya sebagai alat bagi perempuan di India untuk memfasilitasi mereka agar dapat memperoleh pendidikan kembali. Selain itu, UN Women memfasilitasi mitra-mitranya yang ingin berperan dalam program tersebut. Di dalam perannya sebagai aktor independen, UN Women mengambil inisiatif dan keputusan untuk mengimplementasikan *Second Chance Education and Vocational Learning Programme* (SCE programme). Untuk mengimplementasikan program ini, UN Women bekerja sama dengan berbagai pihak. Namun, kerja samanya dengan pihak lain yang ada di India dapat mengancam kemandirian/independensi dari keputusan UN Women. Sebab, pasti akan ada pertemuan dan diskusi tentang implementasi dari SCE Programme di India tersebut yang bisa saja mempengaruhi keputusan dari UN Women. Adapun tantangan yang harus dihadapi oleh UN Women dalam

mengatasi diskriminasi perempuan di India, yaitu kuatnya budaya dan norma sosial dari masyarakat India, serta kegagalan pemerintah India dalam mengimplementasikan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., & Hastira, M. F. (2023). Perbandingan Implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(1), 68–87.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/25646>
- Ahmad, S.Kom., M.Kom., I., Djajasinga, MSc. CPFF. IPM., D. I. N. D., Astuti, SE., MM, S. D., Sanny, SE., MM, A., Cahyadi, S.ST., M.M., N., & Mamengko, S.Pd., M.M., R. P. (2022). *Digital Marketing (Concept, Strategy, and Implementation)*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Archer, C. (2001). *International Organizations: Third Editions*. Routledge.
- Biddle, B. J. (1979). *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. Academic Press, Inc.
https://www.google.co.id/books/edition/Role_Theory/oc5GBQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=role+theory&printsec=frontcover
- Bureau, N. C. R. (2023). *Crime in India 2022: Statistics Volume-I*.
<https://ncrb.gov.in/crime-in-india-year-wise.html?year=2022&keyword=>
- Center, P. R. (2022). *How Indians View Gender Roles in Families and Society*.
www.pewresearch.org
- DW. (2013, April 26). *Diskriminasi Perempuan di India*.
<https://www.dw.com/id/perempuan-di-india-tanpa-perlindungan/a-16772444>

- Fernandez, C., & Puri, H. (2023). A Statistical Portrait of the Indian Female Labor Force. *ADB Policy Brief*, 17, 1–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56506/>
- Foundation, B. (n.d.). *Second Chance Education and Vocational Learning Programme*. https://www.bhp.com/es/-/media/project/bhp1ip/bhp-com-en/documents/sustainability/communities/bhp-foundation/education-equity/190704_bhp-foundation_second-chance-education-and-vocational-learning-programme.pdf
- Foundation, C. of I. (2023). *What is Devadasi System in India?*
<https://childrenofindia.in/what-is-devadasi-system-in-india/>
- Fraym. (2021). *Analyzing Girl Child Marriage: Malawi Deep Dive* (Issue 2).
<https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/resource-centre/analyzing-girl-child-marriage-india-deep-dive/#resource-downloads>
- Global Data. (2021). *The Gender Ratio of India (2018-2026, Males per 100 Females)*. Global Data. <https://www.globaldata.com/data-insights/macroeconomic/the-gender-ratio-of-india-325545/>
- The Constitution (Eighty-Sixth Amendment) Act, 2002 Right to education, 2002 (2002).
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/amend86.pdf
- Gunawan, M. A. (2015). *Statistik Penelitian Bidang Pendidikan, Sosial, dan Psikologi*. Parama Publishing.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indonesia, B. N. (2021, December 18). *Ibu-ibu rumah tangga di India bunuh diri setiap 25 menit, apa sebabnya?*
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-59678737>
- Indonesia, C. (2023). *Devadasi, Perbudakan Seks Berbalut Pemujaan Dewa*

- di India*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230125131548-4-408119/devadasi-perbudakan-seks-berbalut-pemujaan-dewa-di-india>
- Jackson, R., & Sørensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches: Fifth Edition*. Oxford University Press.
- Jasmine, N. W. (2022). *The Struggle of UN Women in Resolving Gender Equality in India*. July, 1–13.
https://www.researchgate.net/publication/361747007_The_Struggle_of_UN_Women_in_Resolving_Gender_Equality_in_India
- Jhabvala, R., Pandey, S., Mohanty, S., Dey, N., Rahut, D., & Seetha Ram, K. (2023). Women's Economic Empowerment as a Pathway Toward Sustainable and Inclusive Development in India. *Policy Brief, 11*, 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56506/>
- MHRD. (2018). Educational Statistics at a Glance 2018. In *Educational Statistics at a Glance*.
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/ESAG-2018.pdf
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Nations, U. (2015). The World's Women 2015: Trends and Statistics. In *United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division*. <https://doi.org/10.18356/9789210573719>
- NDTV. (2022). *35,493 Dowry Deaths Reported Between 2017-21: Government*.
<https://www.ndtv.com/india-news/35-493-dowry-deaths-reported-between-2017-21-government-3607608>
- Schooling, N. I. of. (n.d.). *Profile*. Retrieved May 9, 2024, from
<https://www.nios.ac.in/about-us/profile.aspx>
- UN Women. (2022). *Gender Equality And Youth Development*.
<https://india.un.org/en/172095-gender-equality-and-youth-development>

Welle, D. (2022). *Why are there few women in Indian politics?*
<https://www.dw.com/en/why-are-there-few-women-in-indian-politics/a-61098984>

Wire, T. (2022, July 29). *Indian Politics has a Clear Gender Imbalance. That's Why We Need the Women's Reservation Bill.*
<https://thewire.in/women/indian-politics-has-a-clear-gender-imbalance-thats-why-we-need-the-womens-reservation-bill>

Women, National Commission for. (1961). *The Dowry Prohibition Act, 1961.*
<http://ncw.nic.in/important-links/List-of-Laws-Related-to-Women>

Women, U. (2021). *Second Chance Education Programme.*
<https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/09/programme-brief-second-chance-education-programme-india>

Women, U. (2022). *Our partners make the difference.*
<https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-06/UN-Women-financial-brochure-2021-en.pdf>

Women, U. (2022). *Second Chance Education Programme: Creating Pathways of Learning, Employment and Entrepreneurship for Women in India.*
<https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/06/creating-pathways-of-learning-employment-and-entrepreneurship-for-women-in-india#:~:text=The Second Chance Education programme,%2C Maharashtra%2C Rajasthan and Odisha.>

Women, U. (2023). *Our Space is Your Space.* UN Women.
<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/03/sce-our-space-is-your-space>

Women, U. N. (n.d.). *UN Women in India.*
<https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2023-01/in-UN-WOMEN-OVERALL-BROCHURE-251022-s.pdf>

